TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG

Oleh :
AYU MAULIYAWATI
21311023

ABSTRACT

This research was conducted at the Land Office in Bandung. The phenomenon that occurs is a delay in the preparation of budget realization report, the phenomena occurs because the finance department has not received documents from the treasurer's financial and administrative subdivisions second phenomenon that has not been achieved due to the planned expenditure of work that has not been done or executed.

The method used in this research is descriptive method. The analysis in this study is the preparation of the budget realization in Bandung Land Office. Data collection is carried out this research with field studies conducted by observation, interviews, documentation and library research.

The results showed that the preparation of the budget realization report can be said to be good because it was in accordance with the Director General of Treasury No.PER-57/PB/2013, but the time lag in the preparation of the budget realization that the preparation of the budget realization report is not completed on time due to the financial section yet obtain financial documents from the treasurer subsections administration, administration should subbagin more responsible in carrying out their duties without the need to be reminded by the finance department. Then for the expenditure has not been achieved due to the presence of a work plan that has not been done, you should have to do the financial part of the revised Budget Implementation List

(DIPA) a maximum of two (2) times a year, due to the revised work plan that DIPA can know who has not worked and realization spending next year could be achieved.

Keywords : Budget, Preparation of Budget Realization

I.PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma pemerintahan di berbagai negara yang sedang dalam proses pergeseran dari *ruling government* menuju kearah *governance* dan penciptaan administrasi pemerintah yang berhasil guna, berdaya guna dan berkeadilan telah menimbulkan kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, terbuka, adil, bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah entitas akuntansi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Bandung menurut Bapak Asep Saepul Mujahid, SH selaku staff urusan perencanaan dan keuangan adalah terjadinya keterlambatan dalam penyusunan realisasi anggaran. Penyusunan realisasi anggaran seharusnya selesai pada akhir tahun atau tanggal 31 Desember, penyusunan realisasi anggaran tersebut sudah dapat dilaksanakan atau dibelanjakan, namun pada kenyataannya penyusunan realisasi anggaran terkadang selesai pada bulan Maret tahun berikutnya, kemudian keterlambatan tersebut akan mengakibatkan hilangnya sebagian waktu yang seharusnya sudah dilaksanakan. Fenomena tersebut seharusnya tidak terjadi apabila penyusunan realisasi anggaran dapat selesai tepat waktu. Fenomena tersebut terjadi karena bagian keuangan belum mendapatkan dokumen

keuangan dari bendahara subbagian tata usaha sehingga bagian keuangan tidak bisa memproses laporan realisasi anggaran.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam bentuk Tugas Akhir dengan judul :

"TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG".

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti yaitu, adanya keterlambatan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyusunan laporan realisasi anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ?
2. Masalah atau kendala apa yang terjadi dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ?
3. Bagaimana penyelesaian masalah atau kendala yang terjadi dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh, mengumpulkan dan mengelola data untuk dapat mempelajari mengenai penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas, dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan realisasi anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui masalah atau kendala yang terjadi dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah atau kendala yang terjadi dalam Penyusunan laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi bagi penulis, Kantor Pertanahan Kota Bandung, juga bagi pembaca yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Penulis
   Memberikan wawasan mengenai laporan realisasi anggaran pada instansi pemerintah khususnya dilingkungan Kantor Pertanahan Kota Bandung.
b. Bagi Kantor Pertanahan Kota Bandung
   Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung dan juga sebagai bahan masukan yang mungkin berguna.
c. Bagi Pembaca
   Menambah wawasan dan memberikan informasi tambahan mengenai penyusunan laporan realisasi anggaran pada instansi pemerintah, khususnya dilingkungan Kantor Pertanahan Kota Bandung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

Menurut **M. Nafarin (2012:15)** anggaran adalah:

"Suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu tertentu."

Sedangkan menurut **Rudianto (2009:3)** anggaran adalah :

"Rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis."

2.2 Tujuan Penyusunan Anggaran

Menurut **M. Nafarin (2012:19)** tujuan penyusunan anggaran adalah :

1. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
2. Untuk merasionalkan sumber dana investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
3. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitandengan keuangan.
4. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
5. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan.

6. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelempok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

2.3 Realisasi

Menurut **Dedi Nordiawan (2010:115)** Realisasi adalah:

"Proses yang harus diwujdkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan."

SedangkanMenurut **Mardiasmo (2009:21)** realisasi adalah :
"Proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata."

2.4 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut **Rudianto (2009:19)** Laporan realisasi anggaran adalah :

" Rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut."

Sedangkan menurut **Dedi Nordiawan (2010:122)** Laporan realisasi anggaran adalah :

" Laporan yang menyajikan ikhitsar sumber, alokasi dan pemakain sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), dalam satu periode pelaporan."

2.5 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga :

a. Membentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Keuangan.
b. Semua dokumen sumber transaksi diproses dalam penyusunan laporan keuangan.
c. Kementerian negara/lembaga melakukan proses posting untuk menghasilkan buku besar
d. Kementerian Negara/lembaga wajib melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Esselon I (UAPPA-EI).
e. Kementerian negara/lembaga menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang di tandatangani oleh Kepala satuan kerja dan wajib disampaikan kepada UAPPA-W, UAPPA-E1 dan KPPN.

2.6 Masalah Yang Terjadi Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut **Didi Carasidiawan:2009** :

1. Adanya keterlambatan dan tidak disiplinnya penyampaian Laporan Realisasi Anggaran ke KPPN (rekonsiliasi) menyebabkan Satuan Kerja terkena sanksi penundaan pencairan.
2. Perencanaan anggaran tidak matang menyebabkan anggaran harus direvisi.
3. Kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik.

Berdasarkan **UU No.24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan** masalah yang terjadi yaitu :

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami proses penyusunan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan tersebut.
2. Terbatasnya penggunaan dan pemahaman atas aplikasi komputer Sistem Akuntansi Instansi.

2.7 Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut **Didi Carasidiawan:2009** :

1. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi antara KPPN dngan satuan kerja tentang pentingnya kesadaran menyampaikan laporan keuangan sebagai bahan rekonsiliasi. Selain itu, untuk meningkatkan SDM satuan kerja dalam mengelola SAI (Sistem Aplikasi Instansi), perlu ditindaklanjuti dengan diklat, pelatihan atau penyuluhan yang memadai dan berkelanjutan.
2. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada satuan kerja- satuan kerja dengan melibatkan instansi terkait seperti Bappenas dan DJA maupun DJPB dalam proses penyusunan perencanaan anggaran yang lebih baik dan lebih terukur.
3. Penggunaan aplikasi PERAN (Realisasi dan Rencana Penarikan) seperti yang diterapkan, contoh mulai tahun 2008 diberlakukan dengan sasaran periode yang lebih lama, bukan hanya diterapkan pada tiga bulan terakhir sebelum tutup tahun anggaran. Hali ini agar proses realisasi dan rencan penarikan oleh satuan kerja dapat lebih terkontrol dengan baik.

Berdasarkan **UU No.24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan** :

Dalam menyusun laporan keuangan diperlukan pegawai yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi. Tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan dari akuntan telah banyak menolong beberapa instansi untuk menyusun laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut **Sugiyono (2013:20)** objek penelitian adalah sebagai berikut :

"Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Menurut **Husein Umar (2013:18)** objek penelitian adalah sebagai berikut :

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Biasa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu".

Jadi dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah sasaran tentang apa atau siapa yang menjadi objek peneliti untuk mendapatkan suatu data. Berdasarkan penjelasan diatas dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penyusunan laporan realisasi anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Menurut **Yvonne Agustine (2013:5)** metode penelitian adalah :

“Sebuah aktivitas yang memberikan kontribusi dalam memahami fenomena yang menjadi perhatian melalui penelitian”.

Menurut **Danang Sunyoto (2013:19)** metode penelitian adalah :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitiaan berlangsung untuk di analisa dan dibuat kesimpulan.

Menurut **Nyoman Dantes (2012:22)** metode deskriptif adalah :

“Metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”.

Menurut **Danang Sunyoto (2013:28)**metode deskriptif adalah :

“Merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul pada saat penelitian berlangsung dan dibuat kesimpulan”.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan, memaparkan keadaan yang ada diperusahaan.

Menurut **Sugiyono (2013:194)** menyatakan bahwa :

"Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder".

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan
   Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai bahan pustaka yang relavan dan referensi lain yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji.
2. Studi Lapangan
   Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan :
   a. Observasi
      Menurut **Yvonne Agustine (2013:56)** menyatakan bahwa :
      "Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penulis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa panduan pengamatan".

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa observasi yaitu mengumpulkan data dengan jalan dengan mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Hasil dari observasi dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan mengambil keputusan.

b. Wawancara

Menurut **Danang Sunyoto (2013:67)** menyatakan bahwa :

"Wawancara merupakan salah satu tekhnik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai".

Dari pedapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan yang diwawancarai.

c. Dokumentasi

Menurut **Husein Umar (2013:30)** menyatakan bahwa :

"Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan".

Dari pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang akan diteliti.

3.4 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

Menurut **Sugiyono (2013:193)** data primer yaitu :

"Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti".

Sedangkan menurut **Yvonne Agustine (2013:25)** data sekunder yaitu :

"Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak lain".

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer karena data yang diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Pertanahan Kota Bandung.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ini, penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran umum perusahaan khususnya untuk mengetahui Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

4.1.2 Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung

Penyusunan laporan realisasi anggaran di Kantor Pertanahan Kota Bandung menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Penyajian setiap setahun sekali dan dilakukan di awal kemudian dibahas dalam rapat anggota, setelah disetujui dan dilaporkan kepada kepala bagian keuangan. Kantor Pertanahan Kota Bandung membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.

Adapun penyusunan laporan realisasi anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai berikut :

a. Bagian keuangan mengumpulkan dan memverifikasi dokumen sumber transaksi.
    1. Perkiraan pendapatan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
    2. Surat Setor Pajak (SSP).
    3. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
    4. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

5. Dokumen lain yang dipersamakan untuk menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, Neraca dan catatan atas laporan keuangan satuan kerja.

b. Dari bagian keuangan diberikan kepada bagian akuntansi untuk dilakukan penyesuaian.
c. Setelah semuanya selesai, bagian akuntansi akan memasukkan transaksi-transaksi tersebut kedalam Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk diproses.
d. Dari aplikasi tersebut dilakukan penjurnalan dan posting ke buku besar yang selanjutnya menghasilkan laporan keuangan.
e. Kantor Pertanahan Kota Bandung mencetak Laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggran, Neraca dan memverifikasi buku besar.
f. Kantor Pertanahan Kota Bandung menyampaikan Laporan Keuangan beserta Arsip Disket Komputer (ADK) setiap bulan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
g. Kantor Pertanahan Kota Bandung melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat setiap bulan dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
h. Kantor Pertanahan Kota Bandung mencetak Neraca, Laporan realisasi Anggaran dan beserta Arsip Disket Komputer (ADK) hasil rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
i. Kantor Pertanahan Kota Bandung menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Esselon I (UAPPA-EI) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala satuan kerja.
j. Kantor Pertanahan Kota Bandung melakukan *back up* data.

4.1.2.2 Masalah atau Kendala Yang Terjadi Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Bandung terutama mengenai penyusunan laporan realisasi anggaran tentunya terdapat masalah di dalamnya. penyusunan laporan realisasi anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung yang memiliki kendala terutama didalam pelaksanaannya, seringkali mengalami kendala atau masalah. Masalah tersebut adalah adanya keterlambatan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang disebabkan karena bagian keuangan belum mendapatkan dokumen keuangan dari bendahara subbagian tata usaha sehingga bagian keuangan tidak bisa memproses laporan realisasi anggaran.

4.1.2.3 Penyelesaian Masalah atau Kendala Yang Terjadi Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung

Selain masalah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung tentunya ada pula cara untuk penyelesain masalah atau kendala tersebut. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya adalah mengadakan pengawasan, pemeriksaan dan memberitahu kepada bendahara subbagian tata usaha harus lebih baik dalam mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya tanpa harus selalu diingatkan oleh bagian keuangan hal ini agar penyusunan laporan realisasi anggaran dapat dikerjakan tepat pada waktunya tanpa ada keterlambatan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung

Hasil analisis yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Bandung mengenai penyusunan laporan realisasi anggaran yaitu melalui beberapa tahapan mulai dari melakukan mengumpulkan dan memverifikasi dokumen sumber transaksi, kemudian semua sumber transaksi diproses ke dalam aplikasi Sistem Instansi Akuntansi (SIA), di *posting* ke buku besar, laporan

keuangan dan Arsip Disket Komputer (ADK) dikirim ke KPPN untuk di rekonsiliasi, laporan realisasi Anggaran dan beserta Arsip Disket Komputer (ADK) hasil rekonsiliasi dengan KPPN dicetak dan dikirim kepada UAPPA-W dan UAPPA-EI, menyusun laporan keuangan lengkap dan disampaikan ke UAPPA-W dan UAPPA-EI disertai dengan pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Kepala satuan kerja serta melakukan back up data. Apabila penyusunan laporan realisasi anggaran tidak berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung maka dalam penyusunannya tidak akan berjalan dengan baik.

Penyusunan laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013 yaitu tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga yang dimulai dari Semua dokumen sumber transaksi diproses dan diverifikasi, melakukan posting ke buku besar, laporan keuangan direkonsiliasi kepada KPPN, menyusun laporan keuangan lengkap dan disampaikan kepada UAPPA-W dan UAPPA-EI disertai dengan pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Kepala satuan.

4.2.2 Masalah atau Kendala Yang Terjadi Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung

Masalah yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam penyusunan laporan realisasi anggaran yaitu adanya keterlambatan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang disebabkan karena bagian keuangan belum mendapatkan dokumen keuangan dari bendahara subbagian tata usaha. Menurut, **Didi Carasidiawan:2009** masalah yang terjadi dalam penyusunan laporan realisasi anggaran yaitu**,** adanya keterlambatan dan tidak disiplinnya penyampaian Laporan Realisasi Anggaran ke KPPN (rekonsiliasi) menyebabkan Satuan Kerja terkena sanksi penundaan pencairan.

Dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi pada kantor Pertanahan Kota Bandung telah sesuai dengan teori yaitu adanya keterlambatan dalam penyampaian sumber transaksi.

4.2.3 Penyelesaian Masalah atau Kendala Yang Terjadi Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung

Adapun penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandunga yaitu, dengan mengadakan pengawasan, pemeriksaan dan memberitahu kepada bendahara subbagian tata usaha agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, tanpa harus selalu diingatkan oleh bagian keuangan. Menurut, **Didi Carasidiawan:2009** menyebutkan kita dapat mendeteksi penyebab dari tidak disiplinnya penyampaian Laporan Realisasi Anggaran ke KPPN (rekonsiliasi) dengan cara meningkatkan koordinasi dan sosialisasi antara KPPN dengan satuan kerja tentang pentingnya kesadaran menyampaikan laporan keuangan sebagai bahan rekonsiliasi. Selain itu, untuk meningkatkan SDM satuan kerja dalam mengelola SAI (Sistem Aplikasi Instansi), perlu ditindaklanjuti dengan diklat, pelatihan atau penyuluhan yang memadai dan berkelanjutan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung sudah menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Laporan Realisasi Anggaran yang telah diposting ke buku besar, direkonsiliasi dan disusun wajib disampaikan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Esselon I (UAPPA-E1) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulannya, maka

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dapat dikatakan baik, karena telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013 yaitu tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga.

2. Masalah yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Bandung yaitu meliputi keterlambatan waktu dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tersebut terjadi karena bagian keuangan belum mendapatkan dokumen keuangan dari bendahara subbagian tata usaha sehingga bagian keuangan tidak dapat memproses laporan realisasi anggaran.
3. Penyelesain masalah atau kendala yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, yaitu dengan mengadakan pengawasan, pemeriksaan dan memberitahu kepada bendahara subbagian tata usaha agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, tanpa harus selalu diingatkan oleh bagian keuangan

5.2 Saran

Penelitian berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung, maka penulis ingin menyampaikan saran yang mudah-mudahan dapat memberikan masukan yang positif guna meningkatkan kuantitas Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Bandung diantaranya :

1. Mengadakan peningkatan atau workshop keuangan agar setiap pegawai mengerti dan memahami lebih dalam mengenai penyusunan laporan realisasi anggaran.
2. Masalah keterlambatan waktu dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tersebut seharusnya tidak terjadi apabila disiplin dalam penyerahan sumber dokumen transaksi ke bagian keuangan agar penyusunan realisasi anggaran dapat selesai

tepat waktu, sehingga tidak akan ada waktu yang hilang atau terbuang dengan percuma.

3. Menigkatkan sosialisasi antara bendahara subbagian tata usaha dengan bagian keuangan tentang pentingnya kesadaran penyampaian sumber dokumen transaksi.

Tabel 1.2

Waktu pelaksanaan penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Bulan					
		Maret 2014	**April 2014**	**Mei 2014**	**Juni 2014**	**Juli 2014**	**Agustus 2014**
I	**Tahap Persiapan**						
	1. Mengajukan Penelitian						
	2. Menentukan Tempat Penelitian						

II	**Tahap Pelaksanaan**						
	1. Mengajukan Surat Pengantar Perusahaan						
	2. Pengumpulan Data						
	3. Melakukan Penelitian						
III	**Tahap Pelaporan**						
	1. Bimbingan Laporan Tugas Akhir						
	2. Revisi Laporan Tugas Akhir						
IV	**Tahap Pengujian**						
	1. Sidang						

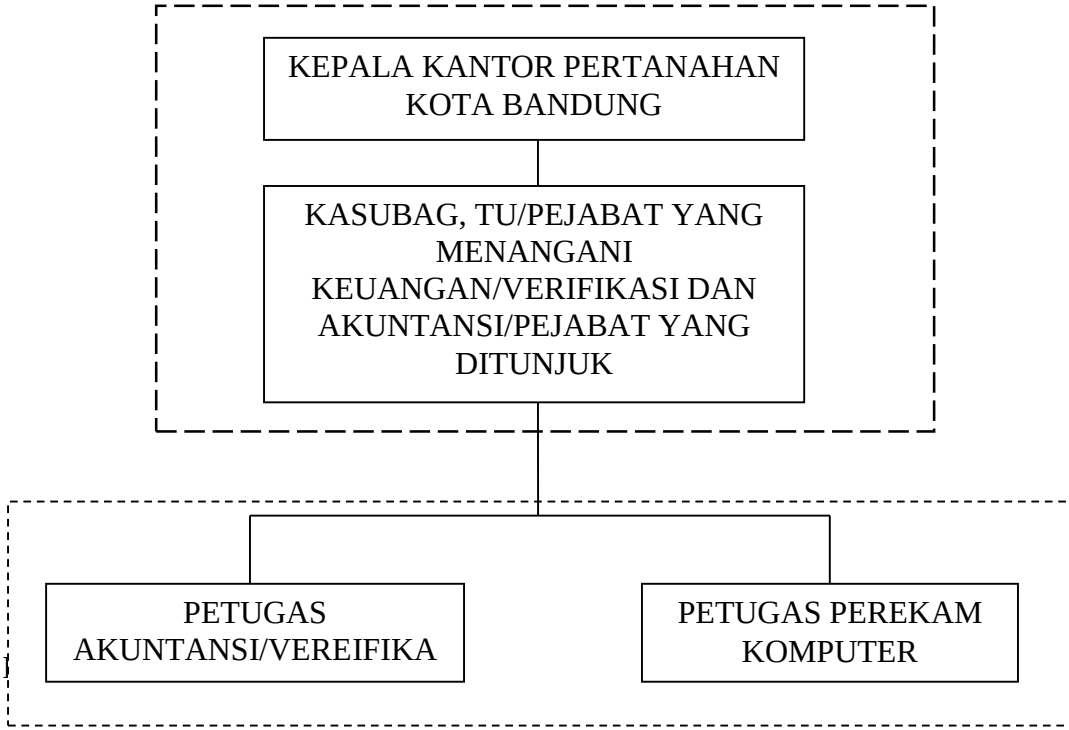
	2. Revisi Laporan Tugas Akhir						

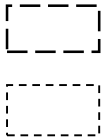
Tabel 4.4

Laporan Realisasi Anggaran
Kantor Pertanahan Kota Bandung
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 Dan 2014
(Dalam Rupiah)

Uraian	2013		2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	26.081.647.050	33.936.821.287	25.879.585.000	27.385.285.531
Belanja Negara	32.078.602.000	28.896.549.958	31.002.500.000	24.126.317.507

(Sumber : Arsip Kantor Pertanahan Kota Bandung 2013)


KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
KASUBAG, TU/PEJABAT YANG MENANGANI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGAS AKUNTANSI/VEREIFIKA
PETUGAS PEREKAM KOMPUTER



Gambar 4.3 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Danang Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. **Bandung**: **PT Refika Aditama Anggota Ikapi.**

Dedi Nordiawan. (2010). *Akuntansi Sektor Publik.* **Jakarta**: **Salemba Empat**.

Dedi Ismatullah. (2010). *Akuntansi Pemerintah.* **Bandung**: **Unit Penerbit dan Percetakan Akademik, YKPN.**

Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. **Jakarta**: **Rajawali**.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor Publik.* **Yogyakarta: CV Andi OFFSET**.

M Nafarin. (2012). *Penganggaran Perusahaan.* **Jakarta**: **Salemba empat**.

Nyoman Dantes. (2012). *Metode Penelitian.* **Yogyakarta**: **CV Andi OFFSET**.

Rudianto. (2009). *Penganggaran.* **Jakarta**: **Erlangga**.

Sugiyono. (2013. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan kombinasi.* **Bandung**: **Alfabeta**.

Tendi Haruma dan Sri Rahayu. (2009). *Penyusunan Anggaran.* **Jakarta: Edisi Pertama, Salemba Empat.**

Yvonne Agustine. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi.* **Jakarta**: **Dian Rakyat**.

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

UU No.24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013

PSAP No.02

Sumber Internet

http://sibukkerjatugas.wordpress.com/2011/12/16/laporan-realisasi-anggaran-berbasis-kas/

http://didicarisidiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap-penyebab-lambatnya - penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah

http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas